

**STUDI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU PADA PUTARAN PERTAMA
DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2013**

Ade Aditia Armi

Email : adeadityaarmi@yahoo.com

Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Panam,
Pekanbaru – Telp : 0761 – 28293

Abstract

This study aims to Determine why participation in District City Pekanbaru lower in the general election of Governor and Deputy Governor of Riau first round in 2013 and factors that influence people not Participate in the election. The concept of the theory used as a basis for analyzing community participation in Riau Governor Election 2013 is According to the theory of Milbrath that states a person's participation can be influenced by two factors: factors supporting and inhibiting factors. Based on the research that has been described, it is known that the factors that influence people's political participation is the type of work and amount of income. While the level of education does not really give effect to the low level of political participation in the District of Pekanbaru City. In addition, there are other factors that influence the low political participation of the community, such as the issue of domicile population, at the time of the election was out of town, and a lack of public confidence in the leader.

Keywords: Factor Participation, Participation, Political, General Election

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk

membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Berbekal dari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur Pemerintahan Daerah, maka melalui produk hukum paling mutakhir ini tiap-tiap daerah di Indonesia dipersilahkan untuk memilih kepala daerahnya sendiri apakah itu Gubernur, Bupati maupun Walikota sesuai dengan tingkatan pemerintahan daerah.

Pada dasarnya kesuksesan sebuah pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga tingkat daerah melalui pemilihan umum. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara

tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013, dimana angka partisipasi pemilih di Provinsi Riau dari 12 kabupaten/kota dalam pemilihan umum putaran pertama sebesar 61,31 persen, dari jumlah total pemilih 4.000.459 DPT. Sedangkan dari Kota Pekanbaru sendiri sebagai Ibukota Provinsi Riau tingkat partisipasi tidak memilih masyarakat mencapai 271.833 (46,28%) dari 587.479 DPT dan yang menggunakan hak pilihnyahnya 315.646 pemilih (53,72%). Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 :
Jumlah pemilih tetap dan pemilih yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013 di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Jumlah DPT (Persentase)	Pemilih yang menggunakan hak pilih (Persentase)	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (Persentase)
1	SENAPELAN	26212 (100%)	14.983 (57,16%)	11.229 (42,84%)
2	PEKANBARU KOTA	20310 (100%)	8.890 (43,77%)	11.420 (56,23%)
3	SUKAJADI	35023 (100%)	16.760 (47,85%)	18.263 (52,15%)
4	SAIL	16064 (100%)	8.502 (52,93%)	7.562 (47,07%)
5	LIMA PULUH	30539 (100%)	15.868 (51,95%)	14.671 (48,05%)
6	RUMBAI	38587 (100%)	22.271 (57,71%)	16.316 (42,29%)
7	RUMBAI PESISIR	45789 (100%)	26.725 (58,36%)	19.064 (41,64%)
8	BUKIT RAYA	59703 (100%)	33.981 (56,91%)	25.722 (43,09%)
9	MARPOYAN DAMAI	80441 (100%)	42.983 (53,43%)	37.458 (46,57%)
10	TENAYAN RAYA	83182 (100%)	44.992 (54,08%)	38.190 (45,92%)
11	TAMPAN	92689 (100%)	49.452 (55,35%)	43.237 (46,65%)
12	PAYUNG SEKAKI	58740 (100%)	30.239 (51,47%)	28.501 (48,53%)
Jumlah		587.479 (100%)	315.646 (53,72%)	271.833 (46,28%)

Sumber : KPU Kota Pekanbaru, 2013.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa, keikutsertaan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013 di kota Pekanbaru dari 12 kecamatan, ternyata partisipasi masyarakat di Kecamatan Pekanbaru

Kota rendah yaitu dari 20.310 DPT hanya 8.890 (43,77%) yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 11.420 (56,23%) tidak menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Studi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

Riau Pada Putaran Pertama di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2013”.

RUMUSAN MASALAH

Mengingat luasnya permasalahan yang mungkin timbul dari uraian diatas, maka penulis membatasi dan merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

Apa saja faktor yang menyebabkan mengapa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota rendah, dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013 ?

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa saja penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013.

B. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan penulis sendiri tentang partisipasi politik masyarakat dan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam meningkatkan partisipasi politik.
2. Sebagai bahan yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat.

3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, informasi dan untuk memperkaya ilmu politik, khususnya dalam bidang partisipasi masyarakat sebagai calon pemilih pada pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013.

KONSEP TEORITIS

Habert McClosky dalam Miriam Budiardjo, memberikan pendapatnya tentang partisipasi politik yaitu: “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dan dalam proses pembentukan kebijakan umum”. (Damsar, 2010:180).

Seiring dengan pendapat diatas, Norman H. Nie dan Sidney Verba juga memberikan pendapatnya tentang partisipasi politik yaitu : “kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. (Miriam Budiardjo, 1998:2).

Dari pendapat diatas terlihat bahwa partisipasi politik adalah salah satu cara atau tindakan menyalurkan keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak dari masyarakat dalam mempengaruhi

kebijakan maupun dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Miriam Budiardjo, memberikan pengertian : “partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif”. (Miriam Budiardjo, 1998:3).

Ramlan Surbakti mengatakan, faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah:

1. Kesadaran politik

Ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

2. Kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik)

Ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak. (Ramlan Surbakti, 1999:144).

Menurut Gabriel Almond, di samping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi juga mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politik. (Mochtar

Mas’oed dan Colin Mac Andrews, 2006:49)

Dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula partisipasinya, pria lebih tinggi partisipasinya dari pada wanita, dan seseorang yang berpendapatan tinggi partisipasinya lebih tinggi dari pada yang berpendapatan rendah.

Menurut Frank Lindenfeld bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi (asing) dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi. (Rafael Raga Maran. 2001:156).

Adapun menurut Milbrath menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimana didalam faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada

dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.

Milbrath menyebutkan 5 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain :

1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik

Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal.

2. Faktor karakteristik pribadi seseorang

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

3. Karakteristik sosial seseorang

Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai – nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga

memperjuangkan tegaknya nilai - nilai tersebut dalam bidang politik.

4. Keadaan politik

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik daripada dalam lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

5. Pendidikan Politik

Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya. (Rafael Raga Maran. 2007 : 156).

Disamping mereka yang ikut serta dalam satu atau lebih banyak partisipasi, ada warga negara masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. McClosky berpendapat bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidaksertaan merupakan

hal yang terpuji. (Miriam Budiardjo, 1998:6).

Ada beberapa alasan mengapa seorang apatis. Pertama terkait dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun ketika pemilihan berlangsung. Kedua, pekerjaan. Pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Ketiga, pendapatan. Pendapatan yang tinggi memudahkan seseorang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara memiliki kelebihan dalam penelitian antara lain dapat

memperoleh dengan cepat tentang informasi yang dibutuhkan, karena informan dipercaya mampu menjawab suatu permasalahan secara relevan.

Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Pekanbaru Kota, yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan. Kecamatan Pekanbaru Kota terletak dipusat kota Pekanbaru dimana tingkat pendidikan, ekonomi dan informasi yang tinggi, tapi mengapa partisipasi politik masyarakat di kecamatan Pekanbaru Kota pada Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013 rendah. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan penulis mengambil kecamatan Pekanbaru Kota sebagai tempat berlangsungnya kegiatan objek penelitian.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*. Teknik ini merupakan pengambilan sumber data yang ada pada informan yang Peneliti pilih sesuai dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan informan berdasarkan *purposive*, penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan sumber data atau Peneliti anggap lebih tahu sehingga di jadikan sebagai informan penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang akan diperoleh. Data primer

adalah data utama yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Data inilah yang dijadikan rujukan penulis dalam mendeskripsikan tentang partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota. Data sekunder yang dimaksud adalah data informasi dan keterangan lainnya yang diperlukan untuk menyusun penelitian guna menjelaskan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh dari kantor Camat Pekanbaru Kota dan KPU Kota Pekanbaru

PEMBAHASAN

Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang di manifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Pada era reformasi yang lebih demokratis, partisipasi politik adalah

bentuk dari fenomena dalam demokrasi. Karena menganut sistem demokrasi, masyarakat pada dasarnya memiliki kebebasan dalam memberikan atau tidak memberikan suaranya pada pemilu. Oleh karena itu tiap-tiap individu memiliki pertimbangan tersendiri mengenai alasan memilih dan tidak memilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013 lalu.

Dari 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan sebuah daerah yang memiliki angka terendah tingkat partisipasinya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tahun 2013, dalam hal ini yang menjadi kajian menariknya adalah sebuah kota yang memiliki tingkat homogenitas penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dalam hal ini dapat dikerucutkan dalam tingkat sosial ekonomi dan pendidikan.

Di Negara berkembang dengan rata-rata pendapatan ekonomi yang rendah, seperti Indonesia, partisipasi politiknya cenderung apatis, skap apatis ini disebabkan karena faktor status ekonomi yang rendah tersebut. Minat politik dan kesadaran politik mereka rendah karena mereka masih sibuk dalam usaha perbaikan taraf hidupnya. (Rafael Raga Maran, 2007:156).

Status Sosial Ekonomi dan Partisipasi Politik

Status sosial ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Samuel P. Huntington yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan sosial dengan partisipasi politik, tingkat status sosial cenderung bervariasi dengan status sosial ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan besar, dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif dari pada mereka yang miskin dan tidak berpendidikan. (Samuel P. Huntington dan Nelson, 1990 : 66).

Pendidikan dan Partisipasi Politik Masyarakat

Berdasarkan tingkat pendidikan dalam rangka melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap partisipasi politik dalam masyarakat dapat dilihat melalui beberapa kriteria pengukuran, diantaranya : pendidikan pemilih pemula dan pengaruh tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013.

Pekerjaan dan Partisipasi Politik Masyarakat

Banyaknya masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota yang tidak ikut memilih/memberikan hak suaranya pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 lalu banyak dipengaruhi oleh faktor jenis pekerjaan. Dimana pekerjaan yang diemban masyarakat ternyata mempersempit ruang gerak mereka dalam dunia politik. Termasuk hanya untuk sekedar ikut memberikan suara pada pemilu pun, mereka banyak yang enggan datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pendapatan dan Partisipasi Politik Masyarakat

Pendapatan yang tinggi pada dasarnya belum dapat menentukan seseorang berpartisipasi dalam politik dan pemberian suara bahkan sebaliknya. Tetapi dengan pendapatan yang tinggi, seseorang mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang sehari-hari harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Faktor Lain yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

Selain faktor –faktor yang dibahas di atas, terdapat juga temuan dari hasil wawancara mengenai alasan masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota untuk tidak hadir di TPS untuk memberikan suaranya,

alasan- alasan ini lebih merupakan alasan temporer ataupun *human eror* dan administrasi kecamatan dalam menentukan DPT , berada diluar kota pada saat pemilihan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau putaran pertama di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2013 partisipasi pemilih tergolong rendah karena partisipasi politik masyarakat yang ikut memilih hanya 43,77% .
2. Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan tidak terlalu memberikan pengaruh bagi partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota. Namun dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, biasanya pengetahuan mengenai politik masyarakat juga semakin tinggi, sehingga masyarakat yang berpendidikan tinggi pada umumnya menyadari akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu. Selain tingkat pendidikan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih dalam pilgubri putaran pertama, diantaranya rendahnya partisipasi politik pemilih pemula yang sangat rendah, tingkat ketidakpercayaan tinggi terhadap calon gubernur dan pemilihan umum

pada umumnya, tingkat pendapatan masyarakat dan pekerjaan masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota yang lebih mengutamakan kepentingan pragmatis untuk lebih memilih berdagang daripada memilih, serta kurang tertiban administrasi Pemerintah Kecamatan dalam menentukan DPT, sedangkan banyak diantara masyarakat Pekanbaru Kota yang tidak lagi tinggal di Kecamatan tersebut.

B. Saran

Melengkapi hasil penelitian yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat, penulis juga mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hal yang perlu dilakukan untuk menekan turunnya jumlah angka pemilih dalam pemilu adalah dengan melakukan gerakan kultural untuk mengembalikan semangat memilih. Ini dapat dilakukan oleh segenap aparat penyelenggara pemilu baik melalui media massa ataupun diskusi formal kepada masyarakat.
2. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat harus lebih digiatkan lagi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menjelaskan kepada masyarakat akan makna dan pentingnya pemilu itu sendiri baik melalui kampanye maupun diskusi politik dengan cara yang tidak menjemukan, sedangkan pendidikan politik harus diarahkan kepada masyarakat dan khususnya kepada pemilih pemula dalam mewujudkan

kesadaran politik yang tinggi, sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana 2010.

Dieter Roth. 2008. *Studi Pemilu Empiris*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

Michael Rush dan Phillip Althof. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik, alih bahasa Kartini Kartono*. Jakarta: Salemba Empat.

Miriam Budiardjo. 1994. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Miriam Budiardjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rafael Raga Maran. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rieneka Cipta.

Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. 1990. *No Easy Choice political Participation In Devolving Countries, Penerjemah: Sahat Simamora, Partisipasi Poitik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Tim Penyusun Buku Pedoman dan Prosedur Ujian Fisip Universitas Riau. 2008. *Pedoman dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip Unri*. Pekanbaru: UR Press.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang "Pemilihan Umum"

Sumber Lain:

BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota dalam angka. 2013.

Nina Yuslimi, 2012. *Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Kabupaten Kampar tahun 2011*. Strata 1 (Skripsi). Universitas Riau.